

ANALISIS KETIMPANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

Tilawatil Ciseta Yoda, Rina Febriani
Fakultas Ekonomi Universitas Baiturrahmah
tilawatilcisetayoda@gmail.com
rinafebriani@gmail.com

Abstract: *Regional independence shows the ability of local governments to finance their own government activities. Regional independence also illustrates the level of community participation in regional development, the more independent an area is, the higher the community participation in paying local taxes and fees which are the main components of PAD. This study aims to evaluate, describe and map the level of inequality in regional financial independence using the Williamson Index between Regencies, Between Cities and Between Regencies and Cities in the Province of West Sumatra (West Sumatra) for the 2015-2017 period. The study was conducted in all districts and cities in West Sumatra Province. The data used in this study consisted of primary and secondary data. Primary data were obtained by conducting interviews with respondents and secondary data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of West Sumatra, the Regional Finance Agency of the Province of West Sumatra, and the Regional and Regency Finance Offices in West Sumatra. The method of analyzing the data of this study is to use the financial independence ratio analysis by looking at the comparison of the realization of PAD with central government transfers, provincial transfers, and regional loans in 2015-2017, then from the results of the financial independence ratio, an imbalance of regional financial independence between districts can be analyzed. between Cities and between Regencies and Cities in West Sumatra using the Williamson Index analysis. The results of the study 1) the ratio of regional financial independence between regencies in West Sumatra Province is categorized as "Very Low" with an average of 9.24%. 2) the ratio of regional financial independence between regencies in West Sumatra Province is categorized as "Low" with an average of 27.79%. 3) the ratio of regional financial independence between regencies and cities in West Sumatra Province in 2014-2017 as a whole 9.94% with the category "Very Low". 4) Analysis using the Williamson index found that the ability of regional financial independence between regencies in West Sumatra has not been Evenly or evenly categorized as moderate. 5) Regional financial independence between cities in West Sumatra has not been evenly distributed with the category Timpang. 6) Regional financial independence between regencies and cities in West Sumatra has not been evenly distributed with the category of Timpang. It is expected that all regency and city governments in Sumatra Barart can optimize PAD revenue by exploring the potential of the area owned. This is because the potential of each region is different, so that in the future it is expected that all districts and cities can be independent by making PAD as the main income of a region.*

Keywords: *regional independence, williamson index, West Sumatra*

Abstrak: Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin mandiri suatu daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, menggambarkan dan memetakan tingkat ketimpangan kemampuan kemandirian keuangan daerah menggunakan Indeks Williamson antar Kabupaten, antar Kota dan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2015-2017. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumbar. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Metode analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan dengan melihat perbandingan realisasi PAD dengan transfer pemerintah pusat, transfer provinsi, dan pinjaman daerah pada tahun 2015-2017, kemudian dari hasil rasio kemandirian keuangan dilakukan analisis ketimpangan kemampuan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten, antar Kota dan antar Kabupaten dan Kota di Sumbar menggunakan analisis Indeks Williamson. Hasil penelitian 1) rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan “Sangat Rendah” dengan rata-rata 9,24%. 2) rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dikategorikan “Rendah” dengan rata-rata 27,79%. 3) rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017 secara menyeluruh 9,94% dengan kategorikan “Sangat Rendah”. 4) Analisis menggunakan indeks Williamson di ketahui bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Sumatera Barat belum merata atau berkategori Merata Moderat. 5) kemandirian keuangan daerah antar kota di Sumatera Barat belum merata dengan kategori Timpang. 6) kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan kota di Sumatera Barat belum merata dengan kategori Timpang. Diharapkan seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan menggali potensi daerah yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena potensi masing-masing daerah berbeda, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan seluruh kabupaten dan kota dapat mandiri dengan menjadikan PAD sebagai pendapatan utama dari suatu daerah.

Kata kunci : kemandirian daerah, indeks williamson, Sumatera Barat

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wujud nyata berlakunya desentralisasi di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian mengalami revisi menjadi UU Nomor 23 tahun 2014. Proses desentralisasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi daerah tersebut. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah dalam rangka membantu pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan program-program pembangunan, serta menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan hasil penelitian Riyanto dan Hermanto (2005) menyebutkan bahwa dari proporsi sumber penerimaan daerah masih dominan dari dana perimbangan. Secara rata-rata, sumbangan dana perimbangan kepada total penerimaan daerah mencapai 80%. Dengan demikian, pembiayaan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal masih sangat tergantung pada dana dari pemerintah pusat, walaupun usaha dalam meningkatkan PAD sudah dilakukan, hal ini tercermin dari peningkatan PAD dari tahun ke tahun.

Menurut Sukadana (2010), ciri utama suatu daerah otonom mampu berotonomi, terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Kemandirian daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin mandiri suatu daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menginginkan kemandirian keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerahnya. Namun realitanya, pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih 17 tahun yaitu mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2018 masih mengalami kasus klasik yaitu walaupun

pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap Kabupaten/Kota, namun dari sisi lain ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan.

Menurut Putong (2010) salah satu cara mengukur ketimpangan kemandirian keuangan daerah adalah menggunakan analisis Indeks Williamson. Pada umumnya Indeks Williamson digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menilai ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan kemandirian keuangan daerah maka pendapatan per kapita diganti dengan rasio kemandirian suatu daerah. Dengan demikian semakin tinggi nilai Indeks Williamsom maka tingkat ketimpangan kemandirian keuangan semakin tinggi, dan sebaliknya.

Fenomena yang terjadi yaitu tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distres (tekanan berat keuangan) karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan utama daerah.. (*sumbar.antarnews.com*)

Berdasarkan fenomena diatas maka perlu adanya analisis lebih jauh. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tren kemandirian keuangan daerah serta seberapa besar ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar kabupaten dan Kota di Sumatera Barat pada tahun 2014-2017

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan mengevaluasi, menggambarkan, dan memetakan daerah antar Kabupaten, antar Kota, dan antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menganalisis rasio kemandirian tahun 2014-2017. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden Kepala Badan Keuangan Provinsi Sumatera Barat, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat berupa data jumlah penduduk kabupaten, Kota serta provinsi di Sumatera Barat periode 2014-2017, kemudian data laporan keuangan daerah dari Badan Keuangan Daerah Provinsi berupa data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer pemerintah pusat & Provinsi serta Pinjaman pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat periode 2014-2017.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	<i>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)</i>				<i>Rata- rata (%)</i>	<i>Kategori</i>
		2014	2015	2016	2017		
1	Kab. Agam	7.91	7.99	8.78	13.41	9.52	Sangat Rendah
2	Kab. Dharmasraya	8.86	8.20	7.62	11.64	9.08	Sangat Rendah
3	Kab. Kepulauan Mentawai	5.72	6.20	5.11	8.28	6.33	Sangat Rendah
4	Kab. Lima Puluh Kota	5.76	6.12	6.74	10.79	7.35	Sangat Rendah
5	Kab. Padang Pariaman	6.52	6.88	6.42	12.13	7.99	Sangat Rendah
6	Kab. Pasaman	10.27	10.39	10.63	17.61	12.23	Sangat Rendah
7	Kab. Pasaman Barat	8.98	8.08	9.81	17.51	11.10	Sangat Rendah
8	Kab. Pesisir Selatan	8.43	8.83	8.54	13.49	9.82	Sangat Rendah
9	Kab. Sijunjung	8.16	9.21	10.02	12.72	10.03	Sangat Rendah

10	Kab. Solok	5.74	5.63	5.78	11.09	7.06	Sangat Rendah
11	Kab. Solok Selatan	5.76	6.44	8.24	10.55	7.75	Sangat Rendah
12	Kab. Tanah Datar	11.49	11.46	10.98	16.60	12.63	Sangat Rendah
13	Kota Bukittinggi	11.98	13.13	12.90	18.61	14.16	Sangat Rendah
14	Kota Padang	20.97	25.48	26.60	38.13	27.79	Rendah
15	Kota Padang Panjang	12.62	16.00	15.24	20.21	16.02	Sangat Rendah
16	Kota Payakumbuh	12.70	17.41	14.53	18.70	15.83	Sangat Rendah
17	Kota Sawahlunto	11.21	11.77	10.48	12.70	11.54	Sangat Rendah
18	Kota Solok	6.66	8.57	8.29	8.86	8.09	Sangat Rendah
19	Kota Pariaman	5.23	5.75	11.55	5.69	7.05	Sangat Rendah
	Maksimal	20.97	25.48	26.60	38.13	27.80	
	Minimal	5.23	5.63	5.11	5.69	5,42	
	Rata-Rata	9.21	10.19	10.43	14.67	9.94	Sangat Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah diatas, maka dapat terlihat rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah antar kabupaten dan kota tertinggi dari tahun 2014-2017 diperoleh Kota Padang yaitu 27,79% dan terendah diperoleh Kabupaten Mentawai senilai 6,33%. Selain itu jika dilihat dari nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota dari tahun 2014-2017 sebesar 11,12% dengan kategori “**Sangat Rendah**”.

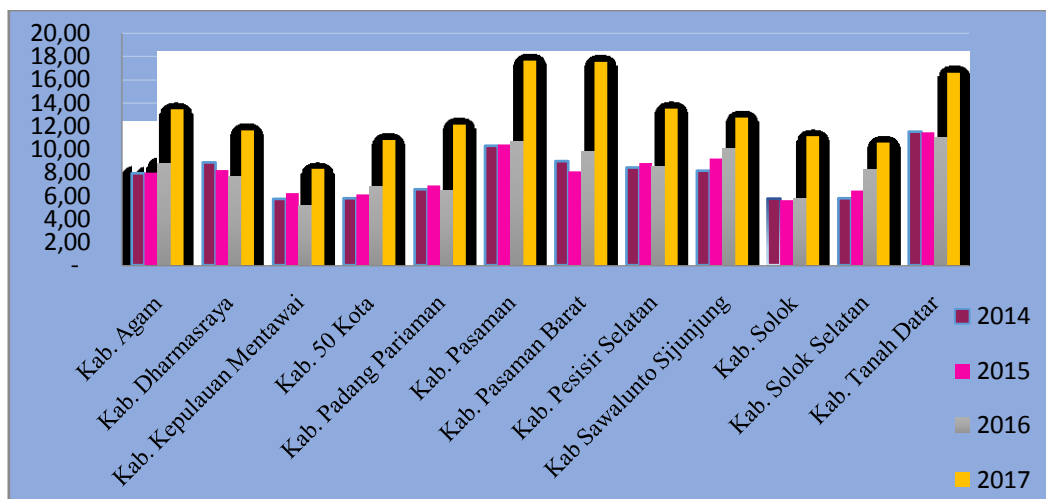
B. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kabupaten di Provinsi Sumbar.

Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan Jumlah PAD Kabupaten dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari yang berupa dana perimbangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pinjaman daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dikategori tinggi, sedang dan rendah salah satunya karena tinggi rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil perhitungan pada tabel 3.1, Dari hasil penelitian terlihat bahwa dari tahun 2014-2017 rasio kemandirian keuangan daerah antar kabupaten di Sumatera Barat sudah mengalami peningkatan dimana rata-rata kemandirian keuangan daerah pada tahun 2014 senilai 7,80%, kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi 7,95% dan 8,22% di tahun 2016 dan 12,98% di tahun 2017. menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat **dikategorikan “Sangat Rendah”** dengan rata-rata 9,24%. Untuk lebih jelasnya bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah pada seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, berikut disajikan di dalam grafik 3.1 yaitu:

Grafik 3.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah antar Kabupaten di Sumatera Barat
Periode 2014-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Dari grafik di atas, rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten tertinggi dari tahun 2014-2017 diperoleh Kabupaten Tanah Datar, sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Melirik hasil tabel diatas, Kabupaten Tanah datar sebagai daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2014-2017 sebesar 12,63%. Memberikan indikasi bahwa daerah tersebut sudah mampu mengoptimalkan potensi daerah nya dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Barat meskipun masih dalam kategori “**Sangat Rendah**”

Potensi ekonomi Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan atas tiga kategori yaitu: Sangat Potensial, Potensial, dan Tidak Potensial. Untuk sektor pertanian yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah ubi kayu, kubis, karet, tebu, peternakan sapi potong, peternakan kuda, peternakan kambing potong, budidaya ayam ras pedaging, ayam bukan ras, budidaya itik, dan budidaya ikan air tawar. Sektor lain yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri konstruksi bangunan sipil, pedagang eceran makanan olahan hasil bumi, usaha warung telekomunikasi, pedagang cenderamata, dan wisata sejarah. Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk hampir semua sektor pertanian kecuali cengkih, tembakau, bayam, dan merica. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang potensial dikembangkan adalah galian kapur dan sirtu. Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi bahan tambang berupa batu gamping kristalin yang sekarang dikelola oleh PT Inkalko Agung, dolomit, granit, sirtukul, tanah liat, batu setengah permata, trass, fosfat, batubara, besi, emas, belerang, kuarsa, dan slate. Industri di Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh industri kecil seperti tenunan pandai sikek yang terdapat di Kecamatan Sepuluh Koto, kacang randang/goreng, kopi bubuk, kerupuk ubi, kerupuk kulit, anyaman lidi, gula aren, gula tebu. Sektor industri besar berupa peternakan ulat sutera oleh PT Sutera Krida. Pada tahun 2004 nilai investasi sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Datar mencapai Rp7 miliar dengan nilai produksi sebesar Rp60 miliar. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Datar)

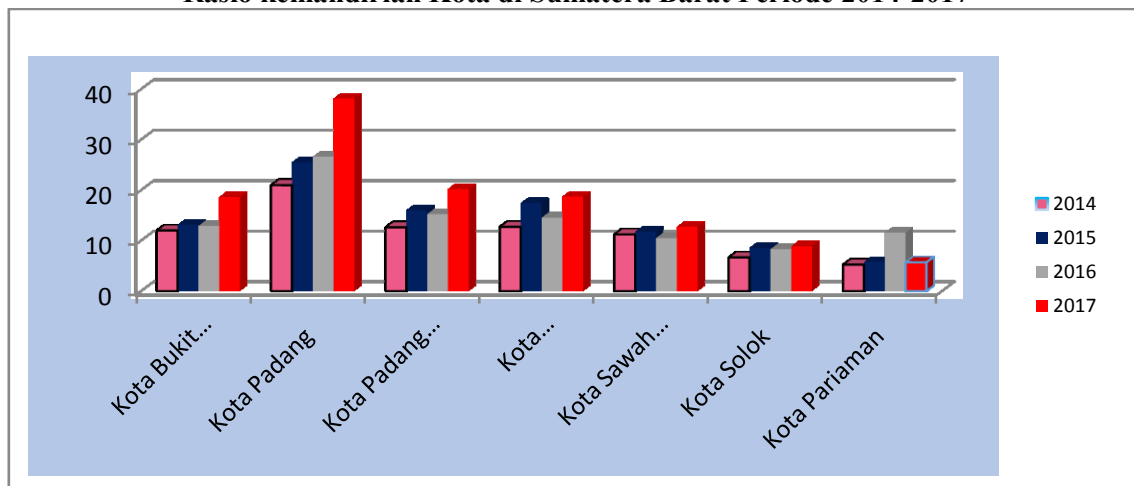
Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah Kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat, posisi geografis Kepulauan Mentawai di lepas pantai Sumatra Barat memberikan keuntungan tersendiri bagi pengembangan wisata ekstrem. Letaknya yang menghadap Samudera Hindia menganugrahi Kepulauan Mentawai ombak yang konsisiten di sepanjang tahun sehingga menjadikan daerah ini menjadi daerah pariwisata yang banyak diminati wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing. Akan tetapi, keadaan geografis Kabupaten Mentawai yang rawan gempa dan tshunami ditambah akses jalan yang sulit ditempuh membuat Kabupaten Kepulauan Mentawai susah mengembangkan potensinya. Apalagi musibah gempa yang terjadi pada akhir tahun 2009 silam dan kemudian disusul dengan gempa yang diiringi tshunami pada akhir tahun 2012 dan 2013 sangat berdampak pada

rendahnya perkembangan dan pertumbuhan daerah kabupaten Mentawai. Hal ini juga berdampak kepada kemandirian keuangan daerah yang dapat dilihat dari tahun 2014-2017, kabupaten Mentawai memperoleh rasio kemandirian keuangan daerah terendah dengan rata-rata 6,33% dengan kategori “Sangat Rendah”

3.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kota di Provinsi Sumbar.

Hasil perhitungan pada tabel 2.4, menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018 secara menyeluruh berada kisaran 14,36% dengan kategorikan “Sangat Rendah” Untuk lebih jelasnya bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah pada antar Kota di Provinsi Sumatera Barat, berikut disajikan di dalam grafik dibawah ini yaitu:

Grafik 3.4
Rasio kemandirian Kota di Sumatera Barat Periode 2014-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Dari grafik diatas terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar Kota tertinggi dari tahun 2014-2017 diperoleh Kota Padang sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah diperoleh Kota Pariaman.

Melirik hasil tabel diatas, Kota Padang sebagai daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dengan rata-rata rasio kemandirian dari tahun 2014-2017 sebesar 27,79%. Memberikan indikasi bahwa Kota Padang merupakan satu kota terbaik dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya di dibandingkan kota lain di Sumatera Barat dengan kategori “Rendah”.

Kota Padang merupakan daerah dengan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar. sehingga membuat sektor perekonomian tumbuh dan berkembang pesat di Kota Padang, seperti restoran, tempat-tempat hiburan, iklan, dan banyak lainnya sehingga hal ini akan membawa dampak positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Padang.

Selain itu Kota Padang telah mampu menggali potensi daerah yang dimiliki salah satunya pada sektor pariwisata, sehingga banyak wisatawan ramai berkunjung ke Kota Padang sehingga membuat Kota Padang sangat diincar investor sebagai lahan investasi yang nantinya akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Padang terutama pajak BPHTB, pajak hotel, pajak iklan, parkir, restoran PBB, dan banyak jenis pajak lainnya.

Selain itu, dapat diamati bahwa rasio kemandirian keuangan daerah terendah antar kota diperoleh Kota Pariaman dimana rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2014-2017 berada pada kisaran 7,05% dengan kategori “Sangat Rendah”. Kota Pariaman merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang resmi berdiri pada tanggal 2 juli 2002 yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Kota yang tergolong baru dengan

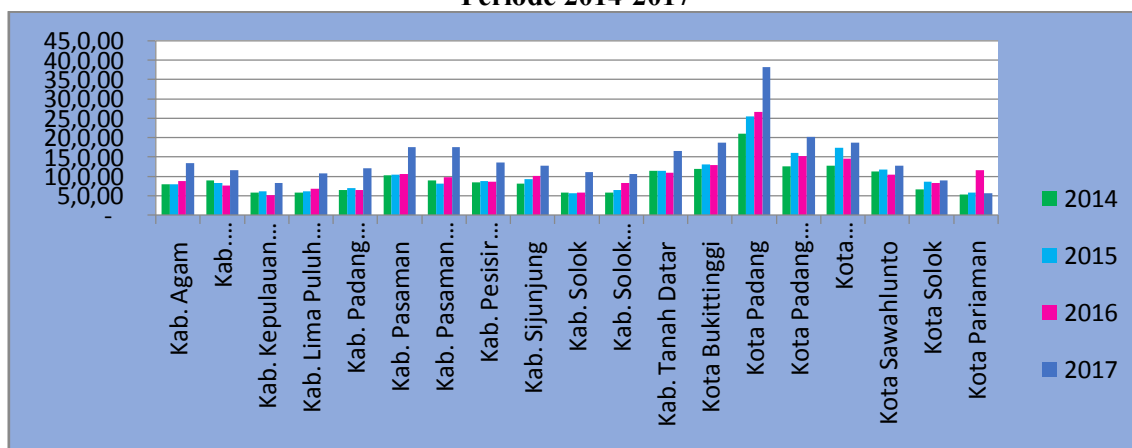
daerah yang tidak terlalu luas, Kota Pariaman hanya memiliki potensi daerah yaitu pada sektor pariwisata.

Rendahnya kemandirian keuangan Kota Pariaman terlihat rata-rata disetiap tahunnya 84,95% dari pendapatan daerah Kota Pariaman diperoleh dari pendapatan transfer dari pemerintah provinsi dan pusat, sisanya lebih kurang 15,05% diperoleh dari PAD dan pinjaman daerah. Rendahnya penerimaan PAD Kota Pariaman menunjukkan bahwa pariaman sebagai salah satu kota pariwisata di Sumatera Barat belum mampu mengujudkan kemandirian daerah seperti yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tentunya harus menjadi tugas bagi pemerintah untuk terus menggali dan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Pariaman agar dapat meningkatkan penerimaan PAD pada tahun berikutnya.

3.1.3 Kemandirian Keuangan Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumbar.

Hasil perhitungan tabel 2.4 menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2017 secara menyeluruh berada kisaran 9,94% dengan kategorikan “Sangat Rendah” Untuk lebih jelasnya bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah pada antar kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, berikut disajikan di dalam grafik 3.7 yaitu:

Grafik 3.7
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat
Periode 2014-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Dari grafik diatas terlihat bahwa rasio kemendirian keuangan daerah wilayah perkotaan rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Kabupaten di seluruh Sumbar. Hal ini menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten, sehingga penerimaan PAD cenderung dominan ke wilayah perkotaan, seperti penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Tampaknya wajar jika basis PAD daerah terutama pada wilayah perkotaan karena umumnya wilayah ini merupakan tujuan investasi.

Wilayah perkotaan dapat menjadikan pajak sebagai tulang punggung PAD, pajak yang biasa dipungut di wilayah perkotaan adalah pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah sebesar 20%-40%, disusul PBB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak reklame. Sisanya (pajak mineral bukan logam dan batuan) memberikan kontribusi cukup kecil, yakni 0%-1% terhadap penerimaan pajak daerah,

Melirik diagram diatas lebih jauh, ternyata rerata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota tertinggi dari tahun 2014-2017 diperoleh Kota Padang dan rasio kemendirian keuangan daerah terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kota Padang

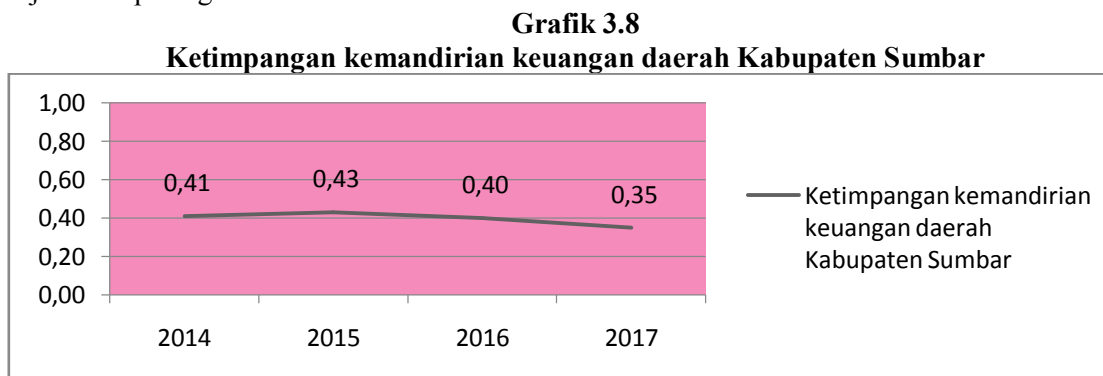
memiliki rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata setiap tahunnya 27,79%. Dimana pada tahun 2014 yaitu 20,97%, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan menjadi 25,48% dan 26,60%, kemudian mencapai puncak tertinggi tahun 2017 yaitu 38,13%. Sedangkan, Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya dari tahun 2014-2017 hanya memperoleh rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah senilai 6,68%. Sebagaimana rinciannya pada tahun 2014, Kabupaten Mentawai hanya memperoleh rasio kemandirian keuangan daerah 5,72%, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya tahun 2015 yaitu 6,20% dan menurun tahun 2016 menjadi 5,11% kemudian meningkat tahun 2017 menjadi 8,28%.

3.2 Interpretasi Analisis Indeks Williamson

3.2.1 Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah antar Kabupaten

Besar kecilnya ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten memberikan gambaran pelaksanaan otonomi daerah antar Kabupaten di Sumbar. Rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dianalisis dengan menggunakan formula *Indeks Williamson* sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 menunjukkan angka ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2017 yaitu 0,35. Angka ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah di provinsi Sumatera Barat masih belum merata. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa ketimpangan antar Kabupaten di Sumbar periode tahun 2014-2017 mengalami kecenderungan meningkat, pada tahun 2014 nilai Indeks Williamson sebesar 0,41, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 0,43 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,40 dan menurun ditahun 2017 sebesar 0,35

Ketimpangan antar Kabupaten yang terjadi di Provinsi Sumbar selama periode 2014-2017 mengalami kecenderungan meningkat kecuali ditahun 2017 dikarenakan tidak seluruh Kabupaten di Sumbar yang gigih dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki, tingginya gap kemampuan kemandirian keuangan daerah tentunya akan membuat ketimpangan semakin tinggi, daerah yang maju akan semakin maju sedangkan daerah yang tidak mengembangkan potensi daerah akan semakin tertinggal. Jika dilihat secara keseluruhan, pendapatan pajak seluruh kabupaten di Sumbar mengalami peningkatan.

3.2.2 Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kota

Besar kecilnya ketimpangan/ketidakterataan kemampuan kemandirian keuangan daerah antar Kota memberikan gambaran ketimpangan kemampuan keuangan antar Kota di Sumbar, untuk melihat ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kota dianalisis dengan menggunakan formula Indeks Williamson sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

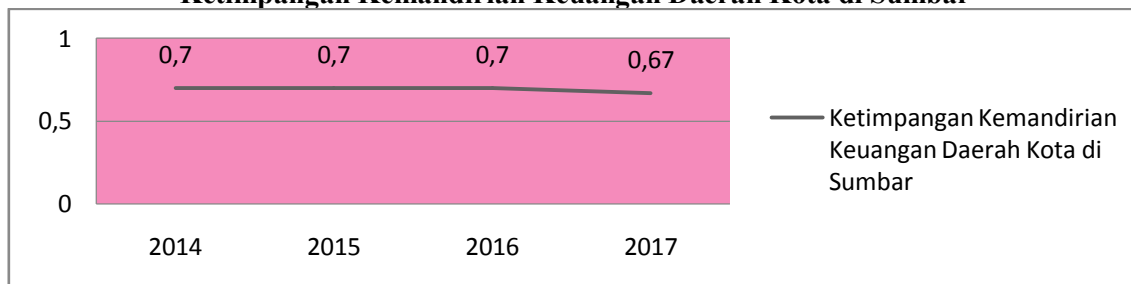
Tabel 3.2
Ketimpangan Kemandirian Keuangan Kota di Sumbar

No.	Tahun	Indeks Williamson	Interpretasi
1	2014	0.70	Timpang
2	2015	0.70	Timpang
3	2016	0.70	Timpang
4	2017	0.67	Timpang
	rata-rata	0,69	Timpang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Tabel 3.2 menunjukkan angka ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2017 yaitu 0,69. Angka ini menunjukkan distribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata lain mengalami ketimpangan karena semakin mendekati 1. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Kota di Sumbar



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kota di Sumbar periode tahun 2014-2016 stabil dari tahun ke tahun yaitu 0.70 dengan kategori timpang, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0.67 dengan kategori timpang. Terjadinya ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kota di Sumbar pada tahun 2014-2017 disebabkan oleh tingginya *gap* antar wilayah yang terlihat dari rasio kemandirian Kota di Sumbar, sebagai salah satu contoh tingginya rasio kemandirian keuangan daerah kota padang tidak sebanding dengan rasio keuangan daerah di kota pariaman sebagai salah satu Kota dengan rasio kemandirian keuangan daerah terendah.

Tingginya jarak (*gap*) antar wilayah ini salah satunya disebabkan oleh potensi daerah yang berbeda sehingga mempengaruhi kemampuan PAD suatu daerah yang dapat dipungut oleh suatu wilayah, Kota Padang yang berhasil mengembangkan potensi daerahnya pada bidang pariwisata, pendidikan, kuliner, dan perdagangan membuat kemampuan penerimaan PAD meningkat disetiap tahun yang berasal dari beberapa jenis pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, Sedangkan keadaan ini bertolak belakang dengan daerah Pariaman. Sebagai Kota yang masih tergolong baru, Kota Pariaman masih dalam proses penataan serta baru mulai mengembangkan potensi yang dimiliki, salah satunya dibidang pariwisata pantai dan peninggalan bersejarah. Kendati begitu, Kota Pariaman sebagai Kota pariwisata belum berhasil menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan PAD, sehingga tidak semua jenis PAD di Kota Pariaman dapat dioptimalkan.

3.2.3 Analisis Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota

Besar kecilnya ketimpangan kemampuan penerimaan PAD antar Kabupaten dan Kota memberikan gambaran tentang kemandirian kemampuan keuangan antar Kabupaten dan Kota di Sumbar dibahas pada tabel berikut:

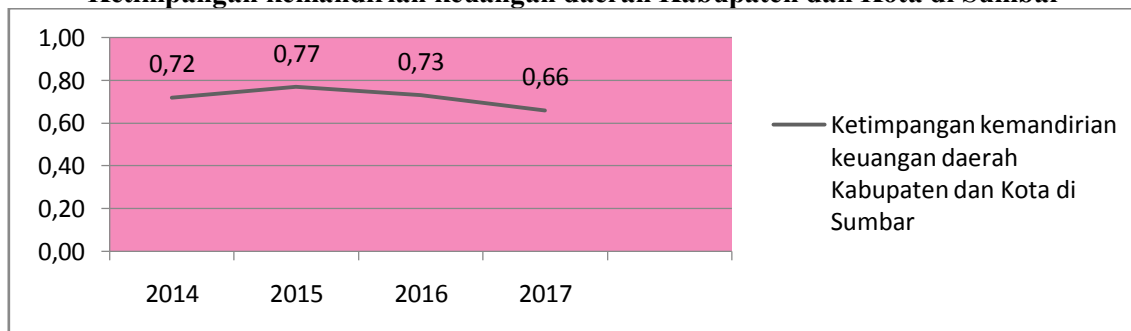
Tabel 3.3
Ketimpangan kemandirian Keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota di Sumbar

No.	Tahun	Indeks Williamson	Interpretasi
1	2014	0,72	Timpang
2	2015	0,77	Sangat Timpang
3	2016	0,73	Timpang
4	2017	0,66	Timpang
	rata-rata	0,74	Timpang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Tabel 3.3 menunjukkan angka ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2017 yaitu 0,74. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan penerimaan PAD di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata lain ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tinggi dengan kategori timpang. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 3.10
Ketimpangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Sumbar



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat periode tahun 2014-2015 mengalami kecenderungan meningkat dari 0,72 menjadi 0,77 dengan kategori sangat timpang, kemudian tahun 2015 menuju tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,73, dan pada tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 0,66 dengan kategori timpang di setiap tahunnya.

Mengingat tingginya ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar kabupaten dan kota di Sumatera Barat, hasil wawancara bersama ibuk Drs. Ekati Elsa Novia, Akt kepala bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjelaskan terdapat beberapa factor penyebab yaitu:

- PAD di perkotaan lebih tinggi di dibandingkan di daerah kabupaten, hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan pembangunan di daerah perkotaan lebih cepat sehingga berkembanglah perekonomian perkotaan seperti banyaknya restoran, perhotelan, mall, tempat wisata, pusat perdagangan dan lain-lain, hal ini tentunya akan meningkatkan penerimaan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.
- Hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat belum mampu menjadikan PAD sebagai sumber pendapatan utama suatu daerah, meskipun kota Padang telah memperoleh rasio kemandirian tertinggi di Sumatera Barat, namun PAD kota Padang tersebut baru mampu memenuhi 10% dari kebutuhan keuangan daerah, sisanya 90% masih diperoleh dari dana transfer dari pemerintah pusat ataupun provinsi. Daerah tertinggal di Sumatera Barat (Pasaman Barat, Mentawai, dan Solok Selatan) hampir setiap tahun belum mampu memenuhi target PAD yang ditetapkan apalagi kemandirian daerah seperti yang dicita-citakan otonomi daerah.

- c. Alokasi Belanja modal bagi daerah yang tertinggal di Sumatera Barat seperti Mentawai, Pasaman Barat dan Solok Selatan sebagian besar digunakan untuk pembangunan, sedangkan daerah perkotaan sudah bias berfokus kepada pengembangan, hal ini tentunya akan membuat daerah perkotaan lebih tinggi perkembangan perekonomiannya dibandingkan daerah tertinggal sehingga membuat semakin tinggi ketimpangan kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat
- d. Potensi daerah belum dikelola dengan maksimal
Hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat potensi daerahnya belum dikelola dengan maksimal seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah sehingga banyak dari pendapatan tersebut yang kebocoran, seperti penerimaan retribusi parkir yang belum optimal, karena banyak dari petugas parkir tidak memberikan karcis retribusi kepada masyarakat yang mana pendapatan tersebut akhirnya tidak diserahkan ke dinas perhubungan, selain itu masih banyak dari pengusaha perhotelan Sumatera Barat yang tidak membayarkan pajak daerah seperti perhotelan, restoran dan lain-lain, namun tidak cepat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- e. Penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi
Penetapan target yang tepat sangat menentukan keberhasilan kinerja suatu daerah, permasalahan yang sering terjadi dilapangan adalah penetapan tarif penerimaan pajak, retribusi yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tanpa memperhatikan potensi yang dapat digali oleh daerah tersebut. Target yang rendah dilakukan dengan tujuan agar realisasi penerimaan dapat tercapai padahal daerah tersebut memiliki potensi yang lebih, penetapan target yang rendah ini sangat membawa dampak buruk terhadap pendapatan daerah tersebut karena memiliki potensi yang tinggi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil analisis rasio kemandirian antar Kabupaten di Sumbar periode 2014-2017 berada pada rata-rata 9,24% dengan kategori sangat rendah, dimana rasio kemandirian tertinggi diperoleh Kabupaten Tanah Datar dengan rata-rata rasio kemandirian 12,63% dengan kategori rendah dan rasio kemandirian terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 6,33% dengan kategori sangat rendah.
- b. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah antar Kota di Sumbar periode 2014-2017 berada pada rata-rata 14,36% dengan kategori sangat rendah, dimana rasio kemandirian keuangan tertinggi diperoleh Kota Padang dengan nilai 27,79 dengan kategori rendah dan rasio kemandirian keuangan terendah diperoleh Kota Pariaman dengan rata-rata 7,05% dengan kategori sangat rendah.
- c. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2014-2017 berada pada rata-rata 9,94% dengan kategori sangat rendah, dimana rasio kemandirian keuangan tertinggi diperoleh Kota Padang dengan rata-rata rasio kemandirian 27,79% dengan kategori rendah dan terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 6,33% dengan kategori sangat rendah
- d. Hasil analisis ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten periode 2014-2017 dengan Indeks Williamson diperoleh hasil dengan rata-rata 0,40 dengan kategori Merata Moderat.
- e. Hasil analisis ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kota periode 2014-2017 dengan Indeks Williamson diperoleh hasil rata-rata 0,69 dengan kategori Timpang,
- f. Hasil analisis ketimpangan kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten dan Kota dengan Indeks Williamson pada tahun 2014-2017 diperoleh hasil rata-rata 0,74 Timpang.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Diharapkan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumbar mampu membuat kebijakan baru yang mampu merangsang kepatuhan wajib pajak, wajib retribusi dll dalam membayarkan kewajibannya.
- b. Diharapkan seluruh Kabupaten/ Kota di Sumbar mampu menetapkan target dan tarif pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga realisasi penerimaan PAD dapat diperoleh secara maksimal.
- c. Diharapkan seluruh pemerintah Kabupaten di Sumbar dapat mengoptimalkan penerimaan PAD dengan menggali potensi daerah yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena potensi masing-masing daerah berbeda, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan seluruh kabupaten dan kota dapat mandiri dengan menjadikan PAD sebagai pendapatan utama dari suatu daerah

E. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
- Riyanto dan Hermanto Siregar, 2005, Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antar Wilayah, *Jurnal Kebijakan Ekonomi* Vol.I No. 1, Agustus 2005. Universitas Indonesia
- Sukadana, I Gede. 2010. Analisis Kemampuan Keuangan daerah Dalam Membiayai Pengeluaran daerah di Kabupaten Klungkung. Tesis. Universitas Udayana
- Rodisin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia
- Sriningsih, Siti. 2013. Analisis Ketimpangan Fiskal Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Distribusi* Edisi ke XXXIII tahun ke XXII, Desember 2013. Universitas Mataram
- Supriyadi, Armandelis, dan Rahmadi, Selamat. 2013. *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo*, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. I No. 1, Juli 2013. Universitas Jambi
- Putong, Iskandar. 2010. *Pangantar Ekonomi Makro dan Mikro Edisi 5*. Ghalia Indonesia
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Jakarta: Kemitraan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
- Dori, Saputra. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal*. Universitas Negeri Padang
- Salim. 2016. Analisis Pemerataan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Tesis. Universitas Andalas